jurnal nasional analysis sektor PDRB

by

Submission date: 01-Sep-2022 12:22PM (UTC+0700)
Submission ID: 1890492599
File name: jurnal_nasional_Analysis_Sektor_PDRB.pdf (698.09K)
Word count: 4839
Character count: 32622

ANALISIS SEKTOR BASIS PDRB DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh
Lalu Satria Utama
IPDN Provinsi NTB
Email: satriabideko@gmail.com

Abstrak

Keterpaduan dan koordinasi pembangunan di antara Kabupaten dengan Provinsi maupun dengan Pusat masih perlu ditingkatkan, hal menyebabkan masih lemahnya sinergi program pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mewujudkan pemerataan karena proses *trickle-down* belum dapat mensejahterakan masyarakat secara merata terlihat dari tidak seimbangnya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat penurunan angka kemiskinan. Potensi unggulan masing-masing wilayah belum dapat digali secara maksimal. Belum sinkronnya gerak langkah berbagai pihak di daerah untuk bisa mendorong kemajuan daerah. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota belum intensif. Sinkronisasi program-program yang dijalankan antar program pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota kurang, sehingga capaian program pemerintah kabupaten/kota masing pemerintah kabupaten/kota-masing belum maksimal. Manfaat dari program tersebut juga belum bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Belum diketahuinya secara jelas sektor basis yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya secara signifikan. Masalah dalam penelitian ini adalah Sektor-sektor manakah yang merupakan sektor basis dari sektor-sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana peran sektor basis dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Maksud penelitian adalah menganalisis sektor-sektor basis dalam mengatasi masalah kemiskinan. Tujuannya adalah : 1). Menganalisis Sektor-Sektor pembentuk PDRB sebagai sektor basis di Kab. Lombok Tengah; 2). Menganalisis peranan sektor-sektor basis dalam pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah. Manfaat dan kegunaan praktis yang diharapkan adalah sebagai masukan untuk kebijakan pembangunan daerah baik di Kab. Lombok Tengah maupun di daerah-daerah lainnya. Manfaat teoritis adalah sebagai kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti lainnya guna memperkaya khasanah akademis dibidang pemerintahan dan perencanaan daerah, serta pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah Peran sektor basis dalam menanggulangi masalah kemiskinan antara lain adalah karena: Peran sebagai peretas keterisolasian atau paling populer dengan sebutan "prime mover", permasalah kemiskinan menyangkut lapangan kerja, Peran sektor angkutan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk para pengusaha/pengelola usaha transportasi, terintegrasinya Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan Pariwisata, peran sebagai pemasok wisatawan di NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci : Pembangunan, Inklusif, PDRB dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia pada tahun 1996 sekitar 22,5 juta jiwa atau 11,3 persen dari seluruh penduduk, kemudian naik menjadi sekitar 79,4 juta jiwa atau 39,1 persen dari seluruh penduduk pada pertengahan tahun 1998. Namun pada akhir Desember 1998 penduduk miskin di Indonesia di koreksi turun menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia, Disamping itu

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antara sektor industri dan jasa dengan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan energi, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antara perkotaan dan, serta antara Jakarta dan kota lain, masih saja ada, karena pada yang pertama pembangunan dilaksanakan sekitar 60-80 persen, sedang pada yang kedua hanyalah 40-20 persen.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka perubahan kearah yang lebih baik. Pengertian pembangunan oleh para akhli bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang dan sistem politik yang berlaku dimana teori tersebut lahir. Sondang P Siagian memberikan pengertian pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building)* Artinya pembangunan tersebut dilakukan secara sadar dan berencana untuk mengusahakan perubahan dilakukan oleh negara (rakyat dan pemerintah) menuju kemajuan dalam berbagai aspek guna memperkokoh rasa nasionalisme dan pembangunan karater bangsa. Kemajuan dalam berbagai aspek atau tujuan dari pembangunan tersebut merupakan paraigma dari pembangunan yaitu "modernisasi, disamping ketergantungan".(Larrin 1994, Kiely 1995) dalam Tikson, 2005. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.Rogers dan Svenning (1969), menjelaskan bahwa modernisasi pada tingkat individu berkaitan dengan pembangunan pada tingkat masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan individual dari gaya hidup tradisional ke suatu cara hidup yang lebih kompeks, secara teknologis lebih maju dan berubah cepat". Berbagai ukuran yang dipergunakan, seperti : "Kekayaan rata-rata; Pemerataan, Kualitas Kehidupan, Kerusakan Lingkungan, . Keadilan sosial dan kesinambungan" (Budiman, 1995) . Berdasarkan cara pengukuran keberhasilan pembangunan tersebut di atas dalm kebijakan pembangunan akan tercermin arah atau orientasi dari strategi yang dipergunakan. Kekayaan rata-rata akan terwujud melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekomoni yang tinggi memerlukan strategi padat modal dan teknologi yang memadai. Hasilnya akan diharapkan adanya dampak tetesan kebawah. Pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu : *trickle down effect dan trickle up effect*.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu : (1). Keterpaduan dan koordinasi pembangunan di antara Kabupaten dengan Provinsi maupun dengan Pusat masih perlu ditingkatkan, hal menyebabkan masih lemahnya sinergi program pengentasan kemiskinan. (2).Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mewujudkan pemerataan karena proses *trickle-down* belum dapat mensejahterakan masyarakat secara merata terlihat dari tidak seimbangnya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat penurunan angka kemiskinan. (3).Potensi unggulan masing-masing wilayah belum dapat digali secara maksimal. (4). Belum sinkronnya gerak langkah berbagai pihak di daerah untuk bisa mendorong kemajuan daerah. (5). Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota belum intensif. (6) Sinkronisasi program-program yang dijalankan antar program pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota kurang, sehingga capaian program pemerintah kabupaten/kota masing pemerintah kabupaten/kota-masing belum maksimal. (7). Manfaat dari program tersebut juga belum bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (8). Belum diketahuinya secara jelas sektor basis yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya secara signifikan.

Masalah penelitian adalah sebagai berikut, Sektor-sektor manakah yang

merupakan sektor basis dari sektor-sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana peran sektor basis dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Maksud penelitian adalah menganalisis sektor-sektor basis dalam mengatasi masalah kemiskinan. Tujuannya adalah : 1). Menganalisis Sektor-Sektor pembentuk PDRB sebagai sektor basis di Kab. Lombok Tengah; 2). Menganalisis peranan sektor-sektor basis dalam pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah .

Manfaat dan kegunaan praktis yang diharapkan adalah sebagai masukan untuk kebijakan pembangunan daerah baik di Kab. Lombok Tengah maupun di daerah-daerah lainnya. Manfaat teoritis adalah sebagai kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti lainnya guna memperkaya khasanah akademis dibidang pemerintahan dan perencanaan daerah, serta pengentasan kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Pembangunan Inklusif

Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan dengan titik tekan dan fokus yang berbeda sejalan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dengan paradigma yang berbeda. Pada masa Orde Baru dengan sistem Pemerintahan yang sentralistik dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang tidak bisa di nafikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi terhormat di tingkat Asia Tenggara dibidang ekonomi sehingga termasuk dalam jajaran "macan Asia" bersama Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan lain-lainnya. Sayangnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut kurang mengakar, sehingga tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensional. Hs Dillon Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan di era 2009-2014, mengatakan bahwa

Selama ini kita terlena oleh sekian banya janji bahwa paradigma *pro-growth* kelak akan memakmurkan semua anggota masyarakat melalui proses *trickle down*… tokoh arus utama Profesor Emil Salim mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menciptakan lapangan kerja dan menambah lapangan usaha, apalagi menanggulangi kemiskinan…. Profesor Budiono pun mengakui bahwa pertumbuhan tidak otomatis dapat mengurangi kemiskinan. (Dillon, 1999)

Pembangunan untuk semua, bukan pembangunan untuk individu atau sekelompok golongan atau lapisan masyarakat tertentu. Makna pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkurang bila hanya dinikmati oleh segelintir warga negara. Pendek kata, PI hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama bukan kemajuan untuk sekelompokorang. … PI dapat digambarkan dengan ciri sebagai berikut : (a). pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran penting, tetapi bukan tujuan; (b), pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk tujuan kemakmuran bersama semua orang dan warga negara, baik laki-laki maupun perempuan serta kaya-miskin; (c). pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik dapat berbuat banyak dalam mengurangi kemsikinan dan ketimpangan; (d). kebijakan dan institusi sosial non ekonomi. Dengan kata lain, institusi jaminan sosial, tata pemerintahan/kualitas pemerintah memiliki kedudukan sama penting dengan kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal) (Prasetyantoko, 2008)

Teori Pembangunan Wilayah

Indeed, Indonesia has come to long way since the Asian financial crisis more than a decade ago. To be sure, the nature advantage from the demographic dividend and natural resources is not new. In our view, improved

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

polities, policy measure to encourage private sector participation together with the structural decline in capital costs will inevitably draw out the entrepreneurialability in the private sector, pushing the economy towards its potential 6-7% level from 2011 on wards …… (Morgan Stanley Group, 2009)

Kutipan di atas berpendapat bahwa paling tidak ada tiga hal utama menjadi membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, stabilitas politik, serta penurunan biaya untuk mendapatkan modal. Ketiga modal tersebut dapat menjadi modalbangsa Indonesia tergabung dalam rezim pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejal tahun 2011 dengan angka pertumbuhan sekitar 6-7% per tahun. Pertumbuhan yang tinggi menurut Morgan harus diikuti oleh pertumbuhan yang berkualitas agar tidak hanya dilirik oleh investor sebagai wahana untuk menanamkan modalnya dalam jangka pendek, bukan dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip redistribusi, keadilan yang selalu diperjuangkan oleh para aktivis dan hal inilah yang dibutuhkan oleh investor di pasar keuangan.

Pertama, konsep basis ekonomi, teori ini beranggapan bahwa permintaan terhadap *input* hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap *output* yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (lokal atau *services*). Permintaan terhadap produksi sektor lokal hanya dapat meningkat bila pendapatan lokal meningkat. Tetapi peningkatan pendapatan ini hanya terjadi bila sektor basis (ekspor) meningkat. Oleh karena itu, menurut teori basis ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi.

Kedua, konsep beranggapan bahwa perbedaan tingkat imbalan *(rate of return)* adalah lebih dibawakan oleh perbedaan-perbedaan dalam lingkungan dari atau prasarana, daripada ketidak-seimbangan rasio modal-tenaga. Dalam kerangka pemikiran ini, daerah terbelakang bukan karena tidak beruntung atau kegagalan pasar, tetapi karena produktivitas yang rendah. Oleh karena itu investasi dalam prasarana adalah penting ssebagai sarana pembangunan daerah. Penalaran teoritis bagi efektivitas investasi dalam prasarana terletak dalam kaitan antara fungsi angregatif dan produktivitas daerah. Namun demikian, tidak seperti pendekatan basis ekonomi, tak banyak terdapat dalam study empiric dengan mempergunakan konsep kedua ini. Hal ini disebabkan karena kelangkaan data (terutama mengenai stok barang modal) (Rustiadi, 2011).

Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor tersebut merupakan sektor basis selanjutnya sebagai sektor unggulan adalah *Metode Location Quotient (LQ)* dan Analisis *Shif Share*. Metode LQ "dipergunkan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikator basis dan non basis dapat digunakan. Metode *location quotient* (LQ), yang merupakan perbandingan relative antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas".((Rustiadi, 2011). Metode lainnya adalah dengan Analisis *Shift Share*, yaitu analisis "untuk melihat potensi pertumbuhan produksi sektoral dari suatu kawasan/wilayah".(Alat alat analisis tersebut akan dipergunakan dalam penelitian ini disesuikan dengan kondisi ketersediaan data dilapangan.

Keberimbangan pembangunan wilayah *(Regional Balance)* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Pendekatan statis dilakukan dengan mengukur kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah, dapat dilakukan secara diskriptif dengan memperbandingkan PDRB, pertumbuhan PDRB, atau PDRB per kapita antar Wilayah. Kesenjangan statis antar wilayah secara lebih terukur dapat dilakukan dengan menggunakan indeks- indeks kesenjangan spasial seperti Williamson Index dan Primacy Index. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) adalah "jumlah nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah" (Andre, 2017).

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif atau kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Seorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (natural). Kemiskinan relatif adalah pendapatan seseorang yang sudah diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Sementara kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau msyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. (Somodiningrat, 1997)

Kemiskinan menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, adalah '"kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat." Hak-hak dasar.dimaksud dalam kutipan tersebut meiputi : "pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik". Kutipan tersebut dapat menginspirasikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya akses terhadap berbagai aspek yang bersifat lintas bidang (sektor). Penyebab kemiskinan menurut Hardiman dan Midgley Sharp, adalah

Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dengan kualitas yang rendah. Kemiskinan timbul sebagai dampak perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitasnya rendah, selanjutnya mereka akan memperoleh upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan informasi, adanya diskriminasi dan atau karena keturunan dan sistem sosial. Kemiskinan timbul sebagai akibat perbedaan akses dalam permodalan (Burhan, 2010).

"peningkatan standar hidup, peningkatan perlindungan sosial serta akses terhadap pekerjaan yang layak. Kebijakan sosial adalah perwujudan pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara dan hak mereka atas pembangunan. Secara umum, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga bentuk instrument, yaitu perundang-undangan dan regulasi, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Ragam instrument ini menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sosial. …. Kebijakan yang efektif membutuhkan sinergi di antara berbagai aktor dan pemangku kepentingan dalam masyakarat. (Fernadez, 2009).

Artinya pemerintah sebagai aktor kunci dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kebijakan sosial seperti halnya pengentasan kemiskinan diwujudkan dalam tiga instrument yaitu peraturan perundang-undangan, program kegiatan dan perpajakan. Instrumen-instrumen tersebut akan efektif bila dilakukan dengan bersenigeri antar berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Pemangku

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

kepentingan hendaknya mengintervensi bidang sosial, yaitu "pendidikan, dan kesehatan, maupun bantuan sosial, perlindungan sosial, aktor-aktor non negara juga bisa berperan aktif untuk membangun sinergi dengan lembaga pemerintah"(. Artinya, pelayanan akan maksimal mencapai tujuan apabila ada sinergi antara pihak swasta dengan lembaga pemerintah. Kebijakan pengentasan kemiskinan tercermin dalam perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran yang pro kemiskinan. Joe Fernadez mengatakan bahwa : "tersedianya mata anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dalam menanggulangi keadaan darurat atau bencana (tanggap darurat)- *poverty action fund*."((Fernadez, 2009). Kutipan tersebut menghendaki adanya secara tegas dalam APBN/APBD mencantumkan mata anggaran untuk kaum miskin dengan meneliti lebih jauh bukan saja nomenkalturnya, tetapi harus jelas kelompok sasaran dan ukuran pencapaiannya. Indikator lainnya adalah "mengalokasikan dana langsung diterima oleh kelompok miskin dengan besar prosentase yang proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan wilayah yang bersangkutan"(Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Maksudnya adalah jangan sampai lebih besar dana operasional dibandingkan dengan yang diterima langsung oleh masyarakat miskin. Dalam penetapan pagu indikatif anggaran dan skala prioritas dilakukan secara terbuka untuk dicermati oleh masyarakat. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung kepada ketepatan bidikan sasaran pemecahan masalah. Sutyastie dan Prijono mengatakan bahwa

…keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa langkah, yang dimulai dari formulasi kebijaksanaan, yaitu mengidentifikasi siapa yang miskin dan dimana mereka berada. Kedua pertanyaan tersebut dijawab dengan mempertimbangkan ;(1) Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah ; sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat pengangguran, dll. (2).Karakteristik demografi sosial, di antaranya tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, dan lain-lain, Pertanyaan kedua tentang bagaimana menemukan yang miskin, dapat dijawab dengan menguji karakteristik geografis, yaitu di mana orang miskin tersebut terkonsentrasi, apakah mereka di wilayah pedesaan atau perkotaan. (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan phenomena yang berkaiatan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan sektor basis.

Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan guna melakukan analisis kuantitatif adalah data PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan data pendukung lainnya. Data tersebut merupakan data sekunder. Data tersebut bersumber dari BPS Kabupaten Lombok Tengah, BPS Provinsi NTB, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan Bappeda Provinsi NTB, SKPD dan kelompok masyakarat tertentu di Kabuaten Lombok Tengah yang dipandang perlu sesuai perkembangan di lapangan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Unit analisisnya adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB dengan melihat besaran PRDRB dan melalui teknik dokumentasi sehingga dalam pendekatan kuantitatif ini tidak mempergunakan sampel.

Analisis yang bersifat kualitatif datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terpilih yaitu para pemangku kepentingan terutama pejabat di Bappeda dan SKPD yang menangani sektor-sektor pembentuk PDRB. Jumlah informan direncanakan sebagai mana terlampir dalam lampirn II

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

. 1. Wawancara dilakukan dengan mewawancara beberapa informan guna memperoleh data kuaitatif guna menjawab pertanyaan penelitian kedua dan instrument yang dipergunakan adalah peneliti sendiri selaku pewawawancara langsung dengan alat bantu : pedoman wawancara, alat perekam, kamera dan alat-alat tulis. Data/Informasi yang diperoleh diuji dengan metode trianggulasi, yaitu mempertanyakan hal yang sama kepada beberapa orang yang berkompeten dengan mengkonuikasikan hasil wawancara dari informan sebelumnya. Pola ini dilakukan berulang-ulang sampai jenuh dan diyakini bahwa jawaban yang diberikan tersebut benar adanya. Trianggulasi data, pemeriksaan anggota informan secara jeli, melakukan pengamatan berulang-ulang dengan proses; lokasi yang tetap, melakukan klarifikasi prasangka peneliti, mempertimbangkan masalah-masalah dari berbagai aspek atas masukan informan. Pernyataan-pernyataan satu Informan, diklarifikasi atau ditanyakan lagi pada informan lainnya berulang-ulang pada informan yang berbeda,sampai diyakini bahwa informasi tersebut benar dan sudah mencapai kejenuhan untuk didiskusikan. Terhadap hasil perekaman data tersebut juga dilakukan pengecekan ulang kepada informan yang memberikan informasi dengan pola menunjukkan dan mempersilahkan baca serta mohon dikoreksi termasuk ditambah. Terhadap informan yang tidak bisa dilakukan dengan pola pertama di hubungi melalui HP.

2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen tertulis yang diterbitkan oleh instansi terkait, seperti data PDRB, data wilayah dan lain-lainnya sebagai data penunjang.

3. Pengamatan (Observasi), dilakukan terhadap fakta-fakta lapangan mengenai keterkaitan sektor basis dalam pengentasan kemiskinan. Lokasi yang dilakukan pengamatan sesuai dengan lokus konsentrasi kegiatan sektor basis guna menjawab pertanyaan penelitian kedua.

Teknik Anaisis data.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dipergunakan alat analisis adalah *Location Quotion (LQ)* yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis pengembangan wilayah sebagai berikut:

(a) $$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

(b) $$SLQ_{ij} = \left[\frac{X_{ijo}(1+g_{ij})^t / nY_{jo}(1+g_j)^t}{X_{io}(1+G_i)^t / nY_o(1+G)^t} \right]$$

Keterangan :

DLQ_{ij} = Dynamic Location Quotient

g_{ij} = laju pertumbuhan sektor (i) didaerah (j) dan didaerah referensi

g_j = rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah (j) dan daerah referensi

$IPPS_{ij}$ = indeks potensi perkembnangan sektor (i) didaerah (j)

$IPPS_i$ = indeks potensi perkembangan sektor (i) didaerah referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah

Sub ini akan menguraikan gambaran umum Kabupaten Lombok Tengah senagai lokasi penelitian. Berikut secara berturut-turut akan diuraikan mengenai komdisi geografis,

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

administrasi pemerinatahan, jumlah penduduk, data kemiskinan. Uraian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai Kabupaen Lombok Tengah baik dari aspek geografis, demografi (penduduk), sosial dan ekonominya.

Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu Kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak pada posisi koordinat bumi antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 ha). Letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur; di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Di bagian Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Berdasarkan dokumen RPJMD 2011-2015, Kabupaten Lombok Tengah pembangian wilayah Kabupaten Lombok Tengah didasarkan kepada kondisi tofografi dan Gerakan Lembaga Pemberdayaan Terpadu Berbasis Rumah Ibadah (Lempermadu).

Perkembangan Pemerintahan Lombok Tengah

Kondisi terakhir (2017) Kabupaten Lombok Tengah terbagi dalam 12 kecamatan yang terdiri dari 139 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km2. Kecamatan Pujut merupakan kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen. Kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen.

Jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan dengan radius berkisar antara 0 hingga 20 km. Jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kecamatan lain mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria. Gambaran Desa/Kelurahan dan Dusun masing-masing kecamatan terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan di Kab. Lombok Tengah.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	
1	Praya Barat	10	-	134	-	
2	Praya Barat Daya	11	-	121	-	
3	Pujut	16	-	262	-	
4	Praya Timur	10	-	183	-	
5	Janapria	12	-	216	-	
6	Kopang	11	-	116	-	
7	Praya	6	9	82	50	
8	Praya Tengah	9	3	110	16	
9	Jonggat	13	-	135	-	
10	Pringgarata	11	-	114	-	
11	Batukliang	10	-	144	-	
12	Batukliang Utara	8	-	191	-	
	Jumlah	**127**	**12**	**1.808**	**66**	

Gambar 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Lombok Tengah 2011-2015

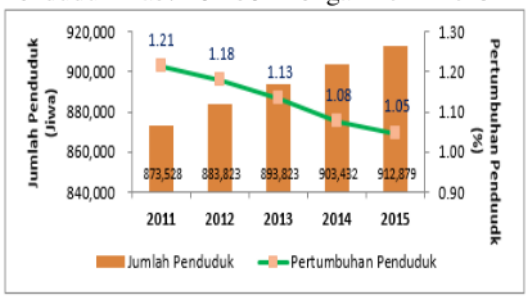

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2015

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kec. Tahun 2014.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Praya Barat	152,75	72.632	21.434	475
2	Praya Barat Daya	124,97	53.836	16.507	431
3	Pujut	233,55	101.745	29.760	436
4	Praya Timur	82,57	65.797	20.135	797
5	Janapria	69,05	73.754	22.869	1.068
6	Kopang	61,66	79.327	23.573	1.287
7	Praya	61,26	108.749	30.312	1.775
8	Praya Tengah	65,92	62.924	18.916	995
9	Jonggat	71,55	93.682	28.876	1.309
10	Pringgarata	52,78	66.272	19.615	1.256
11	Batukliang	50,37	74.964	22.879	1.488
12	Batukliang Utara	181,96	49.750	15.006	273
	Jumlah	**1,208,39**	**903.432**	**69.882**	**11.690**

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah,2015

Pendidikan

Gambar 2. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Thn Keatas di Kab. Lombok Tengah

Tahun 2010-2014

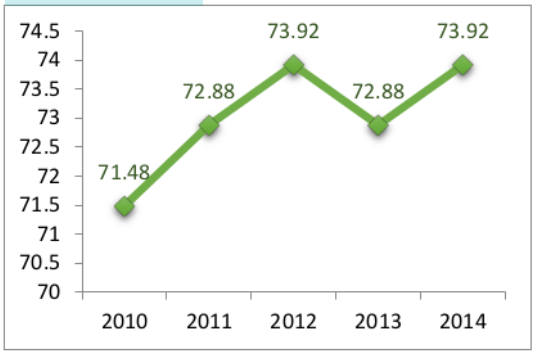

Gambar 9. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2011-2015

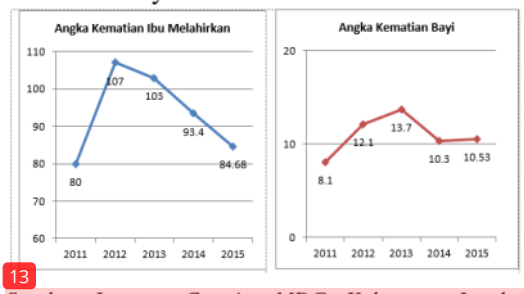

Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015.

Gambar 3. Rata-rata Lama sekolah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014

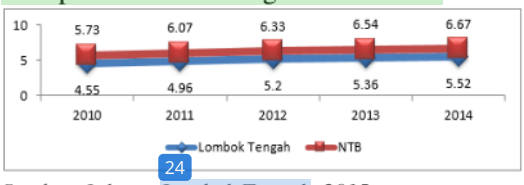

Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015

Gambar 4. APK PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015.

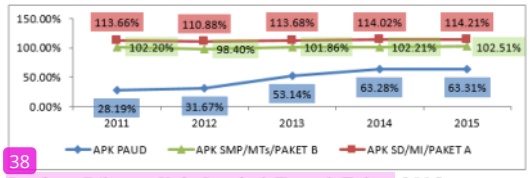

Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015

Kesehatan

Gambar 5. Angka Harapan Hidup di Kab. Lombok Tengah Tahun 2010-2014

Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015

Sesuai dengan uraian dalam Bab III terdahulu bahwa dalam penelitian, guna menjawab pertanyaan penelitian 1(pertama) alat analisis yang dipergunakan untuk menentukan sektor basis adalah tehnik *Location Quotiont (LQ)*. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan tehnik LQ ada tiga kemungkinan (Bendavid – Val,1997:174) :

1. Nilai LQ di sektor i = 1, artinya bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p.
2. Nilai LQ disektor i >1, artinya bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p.
3. Nilai LQ disektor i<1, artinya bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomimi serta tidak perspektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

Dalam analisa di atas, ada 4(empat) type analisa PDRB Kabupaten Lombok Tengah guna melihat peran atau kontribusi PDRB Kabupaten Lombok Tengah terhadapPDBR Provinsi NTB. Peran tersebut menunjukkan sektor mana menjadi sektor unggulan atau sektor basis dari Kabupaten Lombok Tengah, yaitu :

1. Analisa Sktor Basis **PDRB ADHB** Menurut Lapangan Usaha **dengan** Pertambangan Biji Logam
2. Analisa Sktor Basis **PDRB ADHK** Menurut Lapangan Usaha **dengan** Pertambangan Biji Logam di Kab. Loteng Thn 2011-2015
3. Analisa Sktor Basis **PDRB ADHB** Menurut Lapangan Usaha **tanpa** Pertambangan Biji Logam di Kab. Loteng Thn 2011-2015
4. Analisa Sktor Basis **PDRB ADHK** Menurut Lapangan Usaha **Tanpa** Pertambangan Biji Logam di Kab. Loteng Thn 2011-2015.

Tabel 3. Perbandingan Sektor Basis dari masing masing kreteria PDRB

NO URT	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	DENGAN Pertambangan Biji Logam	TANPA Pertambangan Biji Logam	DENGAN Pertambangan Biji Logam	TANPA Pertambangan Biji Logam
1	-	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-
2	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	-
4	Konstruksi	-	Konstruksi	Konstruksi
5	Transportasi dan Pergudangan	Transportasi dan Pergudangan	Transportasi dan Pergudangan	Transportasi dan Pergudangan
6	Real Estat	Real Estat	Real Estat	-
7	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib;	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib;	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib;	-
8	Jasa Pendidikan	-	-	-
9	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;	-	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
10	Jasa Lainnya.	;18;19 = Jasa Lainnya	-	-

Guna memperjelas uraian di atas, dalam tabel berikut disajikan sektor-sektor yang selama lima tahun merupakan sektor basis, berdasarkan kreteria PDRB seperti diuraikan di atas. Sektor-sektor yang kurang dari lima tahun sebagai sektor basis tidak dicantumkan.

Sektor pertanian yang memberikan porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah, mulai tergeser oleh sektor-sektor lainnya. Sektor Pertanian menjadi sektor basis dalam perhitungan dengan mempergunakan PDRB ADHB tanpa Pertambangan Biji Logam.

Peranan Sektor Basis dalam Pengentasan Kemiskinan (Analisis Kualitatif)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, pengamatan dilapangan dan hasil analisis penelitian yang bersifat kuantitatif dalam pembahasan di atas, sektor-sektor yang merupakan sektor basis dan memberikan andil dalam pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah adalah sebagai berikut.

1. Sektor Transportasi dan Pergudangan.

Sektor transportasi dan pergudangan yang merupakan sektor basis di Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan ini akan mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggar Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah kedepan.

Pertama, peran dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah melalui peningkatan nilai tambah sektor transportasi dan pergudangan dari tahun ketahun. **Kedua ,** peran sebagai peretas keterisolasian atau paling populer dengan sebutan "prime mover". Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai 'Tujuan Wisata Kedua di Indonesia".**Ketiga,** Permasalah kemiskinan di Lombok Tengah khususnya dan di Provinsi Nusa Tenggara umunya menyangkut lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja cukup besar dan lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas atau tidak sebanding. **Keempat,** peran sektor angkutan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk para pengusaha/pengelola usaha

transportasi. **Kelima,** Terintegrasinya Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota Dalam Pengembangan Pariwisata.". **Keenam,** peran sebagai pemasok wisatawan di NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Sikap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sangat *wellcome* terhadap pariwisata

2. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan berkembang sebagai dampak lanjutan dari berkembangnya sektor pariwisata yang di dukung oleh sektor pertanian dan sektor transportasi dengan pembenahan infra struktur jalan yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas secara signifikan. Sebagai sektor bangkitan kegiatan sektor pariwisata berfungsi sebagai sektor pasar atau pintu pemasaran bagi hasil hasil pertanian. Perhatian Pemda Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan mendesain program/kegiatan unggulannya. Berikut disampaikan beberapa pernyataan penting hasil wawancara dengan informan terkait dengan pengembangan sektor pariwisata dan sektor pertanian yang berdampak kepada sektor pengolahan. Aktivitas tersebut dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja sehingga berdampak dalam pengentasan kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran sektor basis dalam menanggulangi masalah kemiskinan, karena :

1. Peran dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah melalui peningkatan nilai tambah sektor transportasi dan pergudangan dari tahun ketahun.
2. Peran sebagai peretas keterisolasian atau paling populer dengan sebutan "prime mover".
3. Permasalah kemiskinan menyangkut lapangan kerja.
4. Peran sektor angkutan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk para pengusaha/pengelola usaha transportasi.
5. Terintegrasinya Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan Pariwisata.
6. Peran sebagai pemasok wisatawan di NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

Saran

1. Diperlukan kebijakan yang mendorong terintegrasinya antar berbagai sektor guna mendukung kebijakan-kebijakan yang secara langsung dapat mendcptakan lapangan kerja bagi kelompok miskin.
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menyediakan /mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi untuk obyek wisata yang saat ini masih sulit dikunjungi oleh wisatawan. Penyiapan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sesuai dengan perkembangan permintaan pasar tenaga kerja dengan akses yang lebih besar bagi kelompok miskin.
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu segera membuka route / jalur angkutan umum kesemua obyek wisata yang beroperasi secara rutine setiap hari melayani para wisatawan.disertai peningkatan dibidang keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kabupaten Lombok Temgah dengan membangun pos keamanan sekaligus penempatan personilnya di tiap lokasi kawasan wisata.
4. Disarankan juga melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sektor-sektor yang potensial tetapi belum merupakan sektor basis untuk

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

dikembangkan menjadi sektor unggulan di Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andre B. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty

[2] Budiman. 1995. *Sastra (dan) Ideologi. Sebuah Tinjauan Teoritis* dalam BASIS. Nomor 6 Bulan Juni XLIV. Yogyakarta.

[3] Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosia lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.

[4] Fernandez , Joe .2009. *Anggaran Prokaum Miskin: Konsep dan Praktek",dalam: Abdul Waidl, Yuna Farhan dan Diding Sakri (eds) "Anggaran Pro-Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat*., hal 3-31.Jakarta: Pustaka LP3ES.

[5] Dillon, *H.S*. 1999 *Pertanian Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

[6] Prasetyantoko, A. 2008. *Bencana Finansial, Stabilitas Sebagai Barang Publik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

[7] Remi, Sutyastie Soemitro dan Tjiptoherijanto, Prijono. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

[8] Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun dan R.Panuju Dyah. 2011. *Perencanaan dan. Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka.

[9] Sumodiningrat. 1997. Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[10] Tikson, Deddy, 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysiah dan Thailand. Ininnawa, Makassar.

jurnal nasional analysis sektor PDRB

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	12%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	es.scribd.com Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%
3	Robby Achsyansyah Ishak, Junaiddin Zakaria, M Arifin. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020 Publication	2%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	

		1 %
9	core.ac.uk Internet Source	1 %
10	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	1 %
11	profsyamsiah.wordpress.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1 %
13	www.scribd.com Internet Source	1 %
14	A Herianto, Ibrahim, Mahsup, N Rochayati, Mas'ad. "Analysis of community understanding on the dangers of quarry mining to the environment: a case study of community forest at Karang Sidemen Village North Batukliang District, Central Lombok", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020 Publication	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	ejournal.up45.ac.id Internet Source	<1 %

17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.antara.co.id Internet Source	<1 %
21	idham1104.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
25	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
26	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
27	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
28	doku.pub Internet Source	

		<1 %
29	www.sasambonews.com Internet Source	<1 %
30	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
31	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
32	annaellenora.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
34	oskaryudanto.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	perdhaki.org Internet Source	<1 %
36	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
37	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
38	qdoc.tips Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		